

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Inggit Genasih
NPP. 29.1889

Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.1889@praja.ipdn.a.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of regional autonomy and fiscal decentralization requires local governments to have greater regional financial independence. Attention to revenue management and analysis of regional income is very important for local governments. PAD in the APBD is one measure of regional financial capacity. A large PAD indicates the high independence of a region in financing the affairs of the autonomous government. On the other hand, a region cannot be said to be self-reliant if its PAD is still small. **Purpose:** The reeserach aims to determine financial performance in autonomus Regency of Fakfak by analyzing of Independency Ratio, Effectiveness Ratio, and local revenue Efficiency Ratio of PAD on APBD realization report of Fakfak Regency, West Papua Province. **Method:** The data analysis using descriptive statistical methods with data collection techniques through interviews, documentation, observation. then the data in the analysis using by the data used is the budget realization report for fiscal year of 2018-2020. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the amount of income obtained by Fakfak Regency is very small. **Conclusion:** The results showed that financial independency of Fakfak Regency for fiscal year of 2018-2022 amounted to an average of only 13,60% were classified as very low. Local revenue effectiveness ratio of Fakfak Regency for fiscal year of 2018-2022 avarage achievement level of 99,31% of the budget set which is classified as very effective in realizing the PAD that has been planned and Fakfak financial performance of 2018-2020 fiscal year by Local Revenue efficiency ratio as very efficient with an average of 5.0 % annually. Efforts that can be done to increase PAD is to increase taxpayer supervision by extensifying and intensifying local taxes.

Keywords: Independency Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Realizaion Report, Regional Budget

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran kemampuan keuangan daerah. PAD yang besar menunjukkan tingginya kemandirian suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahan otonom. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2018-2020. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi, kemudian data di analisis menggunakan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018-2020. **Hasil/Temuan:** Pendapatan asli daerah Kabupaten Fakfak tergolong sangat rendah sehingga lebih banyak mengandalkan bantuan transfer dari pusat. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Kabupaten Fakfak dari tahun anggaran 2018-2020 rata-rata hanya sebesar 13,60% yang tergolong sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti daerah dianggap belum mampu dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2018-2020 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 99,31% yang tergolong sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan Kinerja Keuangan Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata 5% setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan biaya pemungutan PADnya.

Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Laporan Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ukuran kemampuan keuangan daerah. APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelaksanaan sosial. PAD yang besar menunjukkan tingginya kemandirian suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahan otonom. Sebaliknya, daerah belum bisa dikatakan kemandiriannya baik jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai

urusan pemerintahannya masih kecil. Berikut Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 1

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020

No	Anggaran	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	PAD	39.808.022.201	55.633.248.228	69.824.039.761
2.	Dana Transfer	875.285.276.022	869.302.985.537	865.496.303.506
3.	Lain-lain PAD yang Sah	27.065.799.549	25.051.260.510	36.910.635.874
4.	Total	1.220.020.884.376	1.305.790.181.974	1.346.388.053.430

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Fakfak, 2021

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Fakfak tahun 2018-2020 secara umum cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, meskipun juga terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2018. Pendapatan daerah Kabupaten Fakfak didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Dimana kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan sebesar 71%. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat”. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam bidang keuangan untuk tahun anggaran 2018-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2018-2020 memperlihatkan bahwa perkembangan keuangan daerah Kabupaten Fakfak bagian penerimaan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada Tahun 2018 anggaran pendapatan pada APBD sebesar Rp 39.808.022.201 namun presentase nya mengalami kenaikan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 jumlah anggaran yang didapat pemerintah ternyata dapat terealisasikan dengan baik. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah juga untuk memperlihatkan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah sudah baik atau belum baik. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Ayu pada tahun 2018 rasio keuangan membuktikan jika rasio kemandirian keuangan daerah dalam kategori masih rendah, rasio efektivitas pada kategori sangat efektif serta rasio efisiensi pada kategori sangat efisien. Peneliti Riswati yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 menemukan bahwa Pada Pemerintah Kota Langsa pendapatan belum mencapai target yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah hanya sebesar 11,00%. Selanjutnya meningkatnya belanja daerah Kota Langsa diakibatkan dari besarnya biaya yang dibutuhkan guna belanja pegawai, yakni senilai 90,37% serta belanja modal sejumlah 46,63%. Penelitian Anjely dkk yang berjudul Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2021, menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan. Penelitian Norma pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang menemukan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah baik dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 dalam Perspektif Islam, penulis menemukan bahwa rasio kemandirian rata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Intan Marlia, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018-2020. Namun penulis menggunakan metode sama yaitu analisis rasio seperti yang digunakan para peneliti Ayu, Riswati, Anjely dkk, Norma dan Intan yaitu menggunakan teori dari Mahmudi (Mahmudi, 2016) dimana menyatakan bahwa ada beberapa jenis rasio keuangan yang bisa digunakan dan dikembangkan berlandaskan data keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan salah satu cara untuk mengukur dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan suatu daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2018-2020 dengan menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD untuk kemudian dilakukan analisis pada ketiga rasio tersebut untuk melihat kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran 2018-2020 di Kabupaten Fakfak.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk memberi gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang nantinya sumber data yang di dapatkan akan dianalisis berdasarkan pada teori yang ada. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi di lapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna dapat menarik suatu kesimpulan. Dengan fokus penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2018-2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemampuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk tahun anggaran 2018-2020. Maka Rasio yang digunakan oleh peneliti adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak. Selanjutnya dari data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan bagaimana Kinerja Keuangan di Kabupaten Fakfak. Adapun hasil analisis tersebut adalah:

3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	39.808.022.201,00	875.285.276.022,00	4,54	Rendah Sekali
2019	55.633.248.228,00	869.302.985.537,00	6,39	Rendah Sekali
2020	69.824.039.761,16	865.496.303.506,00	8,06	Rendah Sekali

Sumber: Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021

Keterangan :

Rendah Sekali : 0%- 25%
 Rendah : 25%- 50%
 Sedang : 50% - 75%
 Tinggi : 75% -100%

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa presntase rasio kemandirian yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuaktif, yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 angka yang diperoleh sebesar 4,54%. Kemudian tahun 2019 terjadinya kenaikan sebesar 6,39%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 8,06% dengan rata-rata hasil yang diperoleh selama 3 tahun berturut-turut sebesar 6,33%. Rasio kemandirian yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu berada diantara 0% - 25%, maka rasio kemandirian daerah tersebut dapat dikatakan instruktif, yang berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah sangat rendah sekali. Ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian dari pemerintah daerah.

3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas PADnya maka menunjukan kinerja keuangan pemerintah daerah belum baik. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	39.808.022.201,00	64.303.619.166,00	61,90	Tidak Efektif
2019	55.633.248.228,00	55.633.248.228,00	100	Efektif
2020	69.824.039.761,16	69.824.039.761,16	100	Efektif

Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021

Keterangan :

Sangat Efektif	:	>100%
Efektif	:	100%
Cukup Efektif	:	90% - 99%
Kurang Efektif	:	75% -99%
Tidak Efektif	:	<75%

Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten Fakfak dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadinya fluktuatif dimana penurunan yang terlihat sangat signifikan dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 61,90% namun pada tahun 2019-2020 terjadi kenaikan sebesar 100% yang tergolong efektif. Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak sudah cukup efektif dalam mengelola PAD nya. Namun, diharapkan ini dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan menjadi lebih efektif lagi.

3.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Fakfak Periode Tahun 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Ket
2018	1.990.401.110,05	39.808.022.201,00	5,00	Sangat Efisien
2019	2.781.662.411,4	55.633.248.228,00	5,00	Sangat Efisien
2020	3.491.201.988,05	69.824.039.761,16	5,00	Sangat Efisien

Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021

Keterangan :

Sangat Tidak Efisien	:	>40%
Kurang Efisien	:	31%- 40%
Cukup Efisien	:	21% - 30%
Efisiensi	:	10% -20%
Sangat Efisien	:	<10%

Dari hasil diatas dapat di lihat bahwa hasil dari Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Fakfak dari tahun 2018-2020 tidak mengalami perubahan atau disebut juga bersifat statis. Dimana dari tahun ke tahun rasio efisiensi PAD pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar 5,00%. Dengan rata-rata dari rasio efisiensi yaitu 5,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak selama kurun waktu tiga tahun anggaran sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PADnya.

3. 4 Diskusi dan Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Fakfak ini dimana kendala terbesarnya adalah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Fakfak ini tergolong sangat rendah, sehingga lebih banyak mengandalkan bantuan transfer dari pemerintah pusat. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2018-2020 memperlihatkan bahwa perkembangan keuangan daerah Kabupaten Fakfak bagian penerimaan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada Tahun 2018 anggaran pendapatan pada APBD sebesar Rp 39.808.022.201 namun presentase nya mengalami kenaikan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 jumlah anggaran yang didapat pemerintah ternyata dapat terealisasi dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan data yang diperoleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020, dapat di tarik kesimpulan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak pada tahun anggaran 2018-2020 masih tergolong instruktif. Sementara pada Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Fakfak pada tahun 2018-2020 tergolong cukup efektif yaitu dengan rata-rata berada pada angka 83,55%. Sementara pada Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Fakfak pada tahun 2018-2020 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata berada pada angka 5%.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu tiga tahun anggaran dan terbatas hanya di Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat. Penelitian hanya terbatas pada indikator Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja saja. Kemudian penelitian ini hanya terbatas pada 3 rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah,

mengingat masih banyak rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun anggaran, dan dapat menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel dan dapat menambah rasio keuangan, sehingga penelitian akan lebih valid.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hutauruk, M. R. 2017. *Akuntansi Perusahaan Jasa*. Jakarta: Indeks.
<https://www.worldmeters.info/coronavirus/> diakses pada Senin, 12 Agustus 2021 pukul 21.13 WIB.
<http://repository.radenintan.ac.id/9862/> diakses pada Sabtu, 14 Agustus 2021 pukul 10.34 WIB.
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9798> diakses pada Sabtu, 14 Agustus 2021 pukul 12.21 WIB.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi .
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Bupati Fakfak No 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Suwanda, D. 2020. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PT.Gramedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar terciptanya transparansi kepada publik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

